**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Agus Riwanto, Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif, ,Thafamedia, Yogyakarta, 2016

Bahder Johan Nasution,Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2011

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008

Dedi Mulyadi, Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2013

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, Cetakan Kesembilan Edisi ke IV, Jakarta, 2015

Dikdik Baegaqi Arif, Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, ,*Bahan Ajar Demokrasi, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional,* 2012

H. Zainuddin Ali, *Metode Penetian Hukum*, Cet. 3 Sinar Grafika, Jakarta

Ni’matul Huda ,Hukum Tata Negara Indonesia Edisi revisi,Cetakan ke 9, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta,2014

Sodikin, Hukum Pemilu Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan, Gramata, Jawa Barat, 2014

Nurnaningsih amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human rights in Democratiche Rechtsstaat), Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, PT.Balai Pustaka (Persero), Jakarta, 2003, Hal. 102

S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita*, Jakarta, 2009

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005

1. **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 )

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316 )

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 8 Tahun 2011, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Pengertian Mahkamah Konstitusi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

1. **Jurnal**

Achmadudin Rajab, *Urgensi Perubahan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*, Jurnal Legilasi Indonesia, Vol. 13 No.02- Juni 2016

Deri Sudarma,Zainal Abidin, *Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Selisih Ambang Batas Suara*, Jurnal Ilmia Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan : Vol. 2, No.3 Agustus 2018

Edi Sumanto, *Relevansi Pemikiran Demokrasi Abu’ala Al-Maududi Dengan Muhammad Natsir*, El-Afkar Vol. 5 Nomor 1, Januari-Juni 2016

Muhammad Afied Hambali, Pemilukada Pasca Reformasi Di Indonesia, Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA, Vol. 8 no. 1 Maret 2014

Pan Mohamad Faiz, *Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil* *Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017

Ridho Imawan Hanaf, *Pemilihan Langsung Kepala Daerah Di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik*, Jurnal Penelitian Politik, Volume II No. 2 Desember 2014

Suyatno, *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia, Politik Indonesia:* Indonesian Political Science Review 1 (2), 2016

1. **Website**

<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>, Akses Tanggal 5 Juli 2021

<https://kalteng.bpk.go.id/ujdih/asset/materi/tahukahanda/Perbedaan%20Delegasi%20Mandat.pdf>, Akses Tanggal 5 Juli 2021

<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/11/201742369/sistem-demokrasi-di-indonesia?page=all>, Akses Tanggal 5 Juli 2021

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3157/putusan-hakim-dalam-acara-perdata, Akses tanggal, 30 Juli 2021